

RATIO LEGIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PEMBUAT MURAL SATIRE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

**RIZKI AGUNG PAMBUDHY
NPM : 719.8.1.0071**

ABSTRAK

Berangkat dari keyakinan bahwa mural merupakan lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur, seiring perkembangannya Mural dianggap menjadi sarana penyampaian pesan politik. Mural yang awalnya menjadi sebuah karya seni jalanan, pada akhirnya justru menimbulkan konflik ditengah tengah masyarakat. Hal tersebut berakibat pada hadirnya pro-kontra yang ada ditengah-tengah masyarakat akibat perbedaan persepsi tentang mural. Perbedaan pandangan ini terjadi antara seniman, masyarakat serta aparat penegak hukum.

Melihat uraian peristiwa sebagaimana yang telah penulis jabarkan diatas, pada akhirnya penulis berupaya untuk merumuskan permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini secara lebih komperhensif untuk mengetahui apa ratio legis penjatuhan hukuman pidana pada pembuat mural satire, serta untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap kajian ilmu yang relevan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi praktisi maupun akademisi.

Dengan menggunakan pendekatan masalah secara *Statute Approach*, yakni dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Kemudian secara lebih lanjut dilakukan inventarisir terhadap bahan hukum Primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topic penelitian. Secara lebih lanjut dilakukan pengolahan data untuk menghasilkan suatu konklusi sebagai pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan pada rumusan masalah.

Penulis berhasil memecahkan permasalahan dengan perolehan hasil penelitian yakni Ratio legis dari penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire adalah demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social. Disisi lain, Negara Indonesia sangat memberikan perhatiannya pada hak asasi manusia terutama kaitannya dengan hak kebebasan berpendapat. Namun perlu digaris bawahi bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tetap harus memperhatikan hak orang lain. Sehingga menghasilkan sebuah solusi yakni Penjatuhan pidana juga harus memperhatikan kebebasan ekspresi yang dilakukan dengan penyeimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan pengormatan pada Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Ratio Legis, Pidana, Mural Satire, Hak Asasi Manusia

***RATIO OF CRIMINAL IMMINATION FOR SATIRE MURAL MAKERS IN
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE***

By :

***RIZKI AGUNG PAMBUDHY
NPM : 719.8.1.0071***

ABSTRACT

Departing from the belief that a mural is a large painting made to support an architectural space, along with its development, murals are considered to be a means of conveying political messages. The mural which initially became a work of street art, in the end, actually caused conflict in the midst of society. This resulted in the presence of pros and cons in the community due to differences in perceptions about murals. This difference of opinion occurs between artists, the community and law enforcement officers.

Seeing the description of the events as described above, in the end the author tries to formulate the problems to be solved in this study more comprehensively to find out what the legal ratio is for imposing criminal penalties on satire mural makers, as well as to find out how the punishment for satire mural makers is in Human Rights perspective. This research is expected to provide benefits both theoretically and practically for relevant scientific studies, especially for the development of legal science as well as for practitioners and academics.

By using the problem approach in the Statute Approach, which is carried out through a literature study by examining the legal norms contained in the legislation. Then further inventory of primary, secondary and tertiary legal materials is carried out that is relevant to the research topic. Furthermore, data processing is carried out to produce a conclusion as a solution to the problem that the author has formulated in the formulation of the problem.

The author succeeded in solving the problem by obtaining the results of the research, namely the ratio legis of the criminal imposition of the satire mural maker for the sake of realizing the welfare and protection of the community, oriented towards the goal of protecting the community to achieve social welfare. On the other hand, the State of Indonesia is very concerned about human rights, especially in relation to the right to freedom of expression. However, it should be